IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN BULOTA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

SRI FATMAWATY UMAR
NIM. D02419045



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN BULOTA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Sri Fatmawaty Umar[1], Apris Ara Tilome[2], Firyal Akbar[3]
[1,23]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023
Email: olha.fatmawatyumar@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Implementation of Road Infrastructure Development in Bulota Village, Limboto District, Gorontalo Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type of research. From the results of the study, it was found that the organization carried out was in accordance with the rules, where the Gorontalo Regency PUPR Office carried out a contractor recruitment mechanism properly. However, at the time of the implementation of road construction activities did not run as the agreed employment contract, which caused the termination of the employment contract to the contractor. Then it was also found that the supervision of the work done was too lacking. Where the PUPR Office in the implementation of supervision has appointed a third party to do so. However, the implementation of supervision by third parties did not run as expected so that in its implementation it produced work that was not in accordance with the existing agreement.

Keywords: *Implementation, Road Infrastructure, Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan telah sesuai dengan aturannya, dimana Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo melakukan mekanisme perekrutan kontraktor dengan baik. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tidak berjalan sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati yang hal ini menyebabkan terjadin pemutusan kontrak kerja terhadap kontraktor. Kemudian juga didapatkan bahwa pengawasan pekerjaan yang dilakukan terlalu kurang. Dimana pihak Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan telah meunjuk pihak ketiga untuk melakukannya. Namun pelaksanaan pengawasan oleh pihak ketiga tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaannya menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Infrastruktur Jalan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia (Astuti, 2018). Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara

berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. “Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup: (1) pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas, (2) pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur (Adisasmita, 2013)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat pedesaaan. Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (www.pu.go.id diakses tanggal 25 Oktober 2022).

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti halnya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah kita dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan melihat dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di dalamnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk itu kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di perhatikan

khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan.

Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009). The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasolong (2011) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan lakang-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Jones (dalam

Arif Rohman 2009) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: 1) Pengorganisasian, Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. 2) Interpretasi, Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 3) Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, tentang manfaat keseimbangan pembangunan sebuah negeri. Pada surah al-A'raf ayat 96, yaitu:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Terkait dengan implementasi pembangunan infrastruktur jalan, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aryananda (2020). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan alokasi dana desa di pulau kijang kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif.

Murba (2017). Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitan.

Mustafa, Cahyo Sasmito (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Implementasi pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi suatu fisik daerah tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancaradan catatan lapangan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan selama ini di Kelurahan Bulota bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan telah dilaksanakan sejak tahun 2018, sebagaimana berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018 tentang peningkatan kapasitas jalan di Kelurahan Bulota. Namun pada kenyataan yang ada, hingga sampai saat ini pekerjaan jalan tersebut belum terselesaikan pengerjaannya. Padahal normalnya

suatu pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan dan disepakati dalam sebuah kontrak pekerjaan paling lama dilaksanakan 3 hingga 6 bulan. Merujuk pada Perda Nomor 50 tersebut seharusnya pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bulota telah selesai dilaksanakan. Sehingga muncul pertanyaan besar apakah dalam pelaksanaan yang dilaksanakan tersebut telah melalui proses perencanaan yang matang kemudian dari sisi organisasi apakah pekerjaan tersebut telah di organisir dengan baik dengan cara membentuk satuan-satuan yang bertanggung jawab serta melalukan pengawasan serta evaluasi atas pekerjaan yanga ada.

Selain itu, dari hasil observasi juga didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut terkesan tanpa adanya pengawasan yang jelas dari instansi terkait maupun dari pihak internal selaku pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur jalan tersebut. Hal ini terbukti bahwa pekerjaan yang ada yang terkesan asal-asalan dan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bahkan beberapa warga masyarakat yang mengeluhkan serta mempertanyakan atas kualitas jalan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor yang dalam proses pengerjaan yang tidak dilakukan evaluasi oleh pihak terkait dalam hal ini dari Dinas Pekerjaan Umum sehingga pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut yang tidak selesai-selesai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif yakni suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata-kata dan atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menurut Bogdan dan Taylor, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Menurut Sugiyono (2012), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*indevenden*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Pendekatan kualitatif menurut Kirk dan Miller, adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perisitilahannya (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas Data Primer, Data Sekunder.

Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan terdiri dari beberapa cara sebagai berikut: 1) Observasi; pengumpulan data melalui observasi dengan melakukan pengamatan dengan menggunakan catatan tak berstruktur. 2) Wawancara; pengumpulan data melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka yang diajukan kepada sejumlah informan yang dipilih. 3) Dokumentasi; dokumentasi umumnya digunakan untuk menjaring data-data sekuder berupa berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan serta dokumen lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh keabsahan data atau uji coba kredibilitas informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data yang diperoleh kepada sumber lain pada waktu berlainan dan dengan metode pendekatan lain. 2)

Member cheek, yaitu mengkonfirmasikan kembali data yang sudah ada kepada responden yang pernah diwawancarai.3) Mengamati dengan cermat, berulang-ulang dan terus-menerus tentang objek yang diobservasi (obyek penelitian). 4) Mendiskusikan data yang sudah ada dengan orang lain yang mengetahui keadaan di lapangan penelitian. 5) Memperpanjang waktu penelitian sehingga lebih banyak kesempatan untuk meninjau kembali hal-hal yang sudah disimpulkan dengan keadaan nyata di lapangan. 6) Mengecek kebenaran dan kecocokan hasil interpretasi dari simpulan yang sudah dirumuskan pada waktu yang lalu pada hasil observasi yang pernah dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan program, baik dalam dunia sosial maupun pendidikan. Implementasi program adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan program itu sendiri. Implementasi melibatkan tindakan para aktor, terutama birokrat, yang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan program. Grindle (Winarno, 2014) menyampaikan visinya tentang eksekutif yang mengatakan bahwa secara umum fungsi eksekutif adalah membentuk mata rantai yang memfasilitasi terwujudnya tujuan politik sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai implementasi atau penerapan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian identifikasi masalah adalah: 1) Tidak terealisasinya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan; dan 2) Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastuktur jalan. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori implementasi program yang dikemukakan oleh oleh Charles O. Jones yang dikutip oleh (Siti Erna Latifi Suryana, 2009) dengan mengidentifikasi tiga dimensi implementasi program, yaitu: 1) Pengorganisasian, 2) Interpretasi, dan 3), Aplikasi atau penerapan. Kemudian oleh peneliti, rujukan atas teori terkait tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisian

Pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, menugaskan tugas-tugas tersebut kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikannya dalam kerangka efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Kepala Dinas PUPR selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas PUPR, Pengawas Lapangan, Kepala Kelurahan Bulota, Kepala Urusan, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat di Kelurahan Bulota terkait dengan dimensi pengorganisasian dalam implementasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo bahwa secara umum dimensi ini telah berjalan dengan baik.

Dalam proses manajemen proyek, dimana telah dilaksanakan sebuah rencana, organisasi pelaksana, pelaksanaan serta evaluasi atas pekerjaan pembangunan jalan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

dan aturan yang berlaku. Dinas PUPR selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaann program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gorontalo telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturannya dalam mengorganisir sehingga memilih kontraktor yang dianggap mampu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jalan. Dalam proses memilih kontraktor yang berkualitas, Dinas PUPR melakukan kajian atas penawaran yang disampaikan oleh kontraktor yang kemudian melakukan kajian atau review atas usulan tersebut sampai dengan menetapkan kontraktor yang memenangkan tender yang selanjutnya akan menjadi pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan. Sehingga jika melihat dari sisi aspek mengorganisir pekerjaan pembangunan jalan, telah dislaksanakan sepenuhnya oleh dinas terkait yakni Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

Dalam proses pengerjaan yang telah dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui proses administrasi berupa penandatangan kontrak pekerjaan. Baik dinas PUPR dan kontraktor telah bersepakat untuk melaksnakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara bersama yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut. Namun setelah pekerjaan mulai dilaksanakan, pihak kontraktor mengalami hambatan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan dalam pelaksana kegiatan yang kualitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya ketidkasesuain waktu kerja dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian pun didapatkan bahwa informan yang berasal dari masyarakat mengeluhkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sehingga dari adanya temuan tersebut, peneliti berasumsi bahwa pengorganisasian yang dilaksanakan dalam pekerjaan ini telah dijalankan dengan baik, namun terkendala pada kualitas sumber daya manusia yang digunakan.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah kesimpulan dari sudut pandang seseorang tentang sesuatu. Tujuan interpretasi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perspektif yang berbeda. Pelaksana harus dapat menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Interpretasi mengacu pada bagaimana program yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan, serta hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Kepala Dinas PUPR selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas PUPR, Pengawas Lapangan, Kepala Kelurahan Bulota, Kepala Urusan, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat di Kelurahan Bulota terkait dengan dimensi interpretasi dalam implementasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo bahwa dimensi ini tidak berjalan dengan baik. Dimana dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut masih belum konsisten dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. Pekerjaan yang dalam pelaksanaan tendernya telah ditetapkan spesifikasi bahan yang akan digunakan, lama waktu dalam penyelesaian pekerjaan serta aspek teknis lainnya ternyata tidak dilakukan sepenuhnya oleh pelaksana pekerjaan. Sehingga hal tersebut menjadi sorotan dari masyarakat atas ketidakmampuan pelaksana dalam melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bulota.

Sehingga hasil wawancara diatas, menurut asumsi peneliti berkesesuaian dengan hasil observasi yang didapatkan,

dimana pada poin 1) Tidak terealisasinya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan; disebabkan karena dari sisi Sumber Daya Manusia pelaaksana pekerjaan yang kualitasnya masih dibawah harapan kemudain belum konsistensi kontraktor atau pelaksanan pekerjaan terhadap waktu yang ditetapkan serta kualitas bahan yang digunakan sebagaimana kontrak kerja yang ditandatangani bersama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo.

3. Aplikasi atau Penerapan

Implementasi adalah teori, metode dan praktik lain untuk pencapaian tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan kelompok atau kelompok, direncanakan sebelumnya dan diorganisir. Aplikasi (aplikasi) direduksi menjadi operasi, operasi, operasi atau mekanisme sistem. Ungkapan mekanisme berarti pelaksanaan (implementation) bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Prosedur kerja harus diperjelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak bertentangan dengan program lainnya. Implementasi juga mengacu pada pelaporan dan evaluasi hasil program yang sedang berjalan

Berdasarkan hasil penelitian yang diapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Kepala Dinas PUPR selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas PUPR, Pengawas Lapangan, Kepala Kelurahan Bulota, Kepala Urusan, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat di Kelurahan Bulota terkait dengan dimensi interpretasi dalam implementasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo bahwa dimensi ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana dalam sebuah proyek yang sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat ternyata dalam pelaksanaannya terkesan asal-asalan. Dalam mekanisme pekerjaan yang ditetapkan, pihak dinas harus menetapkan tim yang mengawasi pekerjaan, yang terjadi adalah bahwa proses pengawasan atas pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara maksimal. Sehinggal hal ini pula yang menyebabkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan tidak dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara diatas bahwa hasil-hasil temuan diatas telah menguatkan hasil observasi yang ditemukan sebelumnya yakni; 2) Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastuktur **jalan**. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas menurut kepala dinas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penunjukkan kepada penyedia jasa yang membantu PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan. Namun menurut masyarakat bahwa proses pengawasan yang dilakukan atas pekerjaan jalan tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana sangat dibawah standar. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa titik jalan sudah mulai rusak, pembuatan drainase yang tidak selesai dan asal-asalan, serta dibeberapa tempat campuran aspal yang terlihat tipis, dan juga jalan yang tidak rata.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 3 indikator implementasi program yang digunakan semuanya belum berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan telah sesuai dengan aturannya, dimana Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo melakukan mekanisme perekrutan kontraktor dengan baik. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tidak berjalan sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati yang hal ini menyebabkan terjadin pemutusan kontrak kerja terhadap kontraktor. Kemudian juga didapatkan bahwa pengawasan pekerjaan yang dilakukan terlalu kurang. Dimana pihak Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan telah meunjuk pihak ketiga untuk melakukannya. Namun pelaksanaan pengawasan oleh pihak ketiga tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaanya menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran terkait dengan hasil penelitian yakni:

1. Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo perlu melakukan evaluasi terkait dengan proses pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana;
2. Dalam melakukan penunjukkan rekanan dalam pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara cermat dan matang guna menghindari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan;
3. Perlu adanya pelibatan unsuru masyarakat dalam proses pengawasan pekerjaan guna mendapatkan hasil pengawasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu

Astuti, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DIY Periode 2010- 2017. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Moleong, Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mustafa, Cahyo Sasmito. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Murba. (2017). Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Nurdin Usman. (2004). Konteks implementasi berbasis Kurikulum. Bandung. CV Sinar Baru

Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Purwanto, Agus, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Siagian, Sondang P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi VI. Raja GrafindoPersada Jakarta.

Rizki Aryananda. (2020). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Siti Erna Latifi Suryana. (2009). Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Winarno, Budi. (2014). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Press.

www.pu.go.id